

BAB I

PENDAHULUAN

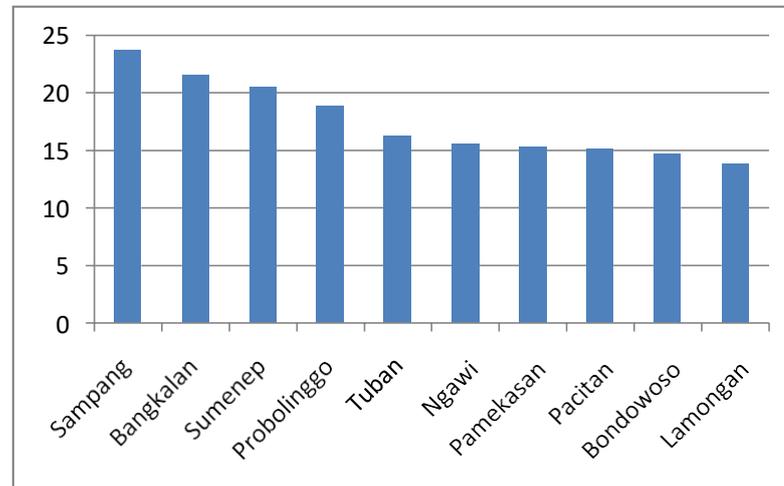
1.1. Latar belakang

Kemiskinan ialah perkara yang masih melekat di negara Indonesia. Masalah kemiskinan masih belum bisa dianggap sepele oleh negara Indonesia karena hampir di seluruh Provinsi masih ada beberapa daerah yang tingkat kemiskinannya masih menunjukkan angka yang tinggi (Dama, dkk. 2016). Indonesia Negara berkembang dengan pendapatan yang relatif rendah. Oleh karena rendahnya pendapatan tersebut, maka proses pembangunan terkena dampaknya. Pembangunan menjadi terhambat sehingga roda-roda ekonomi yang seharusnya juga berjalan akan menjadi melambat jalannya. Kemiskinan timbul apabila seseorang atau segerombol orang belum dapat memenuhi standar ketenteraman hidup yang ditafsirkan serupa kepentingan dasar untuk mencukupi tingkatan kehidupan khusus (Robby, 2020).

Pembangunan yaitu suatu cara untuk melakukan transisi yang lebih teratur dan dilakukan secara berkelanjutan guna menggapai sasaran yaitu menciptakan penduduk Indonesia yang berintegritas, mampu bersaing, berkembang dan makmur (Elda dkk, 2018). Harapan pembangunan nasional negara Indonesia berdasarkan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum menggambarkan kondisi masyarakat yang makmur. Jika suatu masyarakat memiliki kesejahteraan yang baik, maka bisa diartikan bahwa masyarakat tersebut jauh dari kata miskin. Sehingga jika di suatu wilayah mempunyai nilai kesejahteraan yang baik maka daerah tersebut merupakan daerah yang kaya. Akan tetapi, jika suatu daerah

tingkat kesejahteraannya rendah, maka daerah tersebut merupakan daerah miskin.

Gambar 1.1.
Daftar 10 Kabupaten termiskin di Jawa Timur Tahun 2021



Sumber: BPS Jatim 2021 (Data diolah)

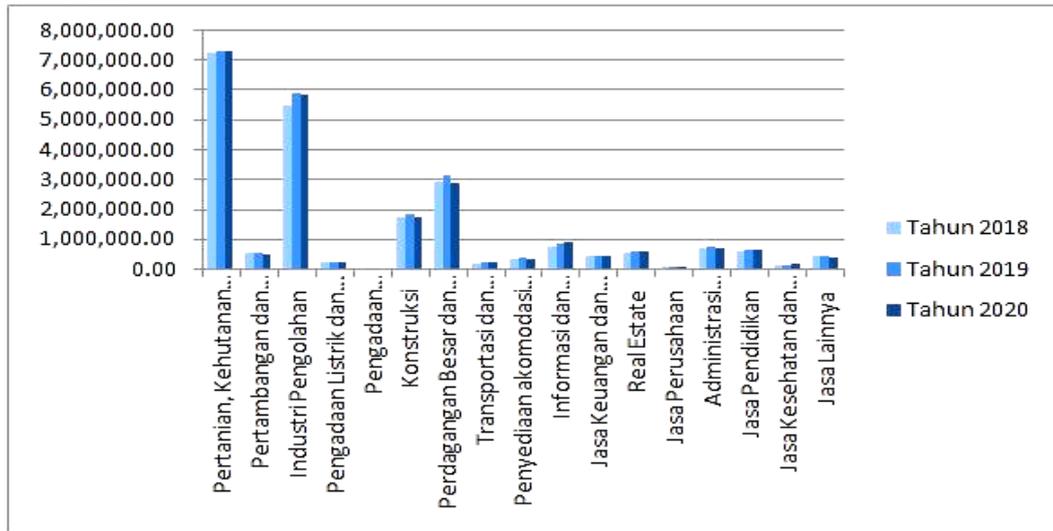
Bersumber pada Gambar 1.1 bisa didapati bahwa Kabupaten Probolinggo adalah kabupaten termiskin keempat dari sepuluh Kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Probolinggo juga termasuk dalam lima daerah di Jawa Timur yang menjadi *Pilot Project* untuk penanganan kemiskinan ekstrem di tahun 2022. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo menggambarkan bahwa selama tahun 2010 sampai tahun 2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo mengalami ketidakstabilan. Pada tahun 2010 tingkat kemiskinan kabupaten Probolinggo sebesar 25,23% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 18,61%. Tingginya tingkat kemiskinan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu tingkat pendapatan masyarakat, kesehatan, pendidikan, lokasi, pengangguran, geografis, gender, dan produk domestik regional bruto di daerah tersebut (Abdul, 2021).

Masalah kemiskinan adalah masalah yang ditanggung bersama antara masyarakat dan pemerintah. Terutama bagi pemerintah, masalah kemiskinan adalah masalah yang harus diselesaikan agar kehidupan masyarakatnya menjadi sejahtera dan makmur. Pemerintah diharuskan mencari solusi untuk mengentaskan kemiskinan, karena pemerintah adalah instansi yang berwenang dalam membuat kebijakan (Rismawati 2018).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu parameter untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dalam kurun waktu khusus. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dihitung berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku dihitung untuk mengetahui keunggulan ekonomi suatu wilayah, sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan dihitung untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah tanpa terpengaruh oleh faktor harga (Lily dan Rini, 2019). Produk Domestik Regional Bruto menjadi indeks telah dilaksanakan dan dicapainya suatu kegiatan yang dapat menyumbang pendapatan atau pemasukan di suatu wilayah tersebut. Semakin baik nilai Produk Domestik Regional Bruto maka semakin baik pula pertumbuhan ekonominya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Probolinggo selalu mengalami kenaikan pada tiap tahun. Namun masih terbilang minim dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Jawa Timur. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mampu menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera memiliki kemungkinan kecil untuk mengalami kemiskinan, maka dari itu Produk Domestik Regional Bruto dianggap mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. Tujuan perhitungan PDRB yaitu untuk membantu pemerintah dalam membentuk

kebijakan atau perencanaan daerah, ulasan hasil pembangunan, serta untuk laporan yang mencerminkan kemampuan perekonomian wilayah (Hafiz, 2020).

Gambar 1.2.
PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Probolinggo



Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo (data diolah)

Bersumber pada gambar 1.2. bisa didapati bahwa penyumbang PDRB tertinggi adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai rata-rata nilai sebesar 7.000.000 juta rupiah. Penyumbang tertinggi kedua yaitu sektor Industri Pengolahan dengan nilai rata-rata 5.000.000 juta rupiah, dan yang ketiga adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan rata-rata nilai sebesar 3.000.000 juta rupiah.

Selain faktor keuangan, faktor pendidikan juga perlu diperhatikan pemerintah Negara Indonesia. Wajib belajar seorang siswa di Negara Indonesia selama 12 tahun atau sampai tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, di Kabupaten Probolinggo rata-rata lama sekolah hanya sekitar 5-6% saja setiap orang. Hal ini tentu saja jauh dari standar wajib belajar yang telah ditetapkan pemerintah Negara Indonesia. Kurangnya tahun belajar pada setiap orang

menyebabkan sumber daya manusia rendah dan minimnya kreativitas. Dampak yang timbul yaitu pendapatan per kapita rendah karena sumber daya manusianya rendah. Pendapatan yang rendah akan menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan.

Populasi penduduk yang padat juga dapat menyebabkan kemiskinan. Padatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan kualitas individu yang memadai, akan menyebabkan kemiskinan. Jumlah penduduk yang besar berarti jumlah tenaga kerja juga besar. Besarnya angka tenaga kerja yang tidak diselaraskan dengan jumlah lapangan pekerjaan akan menimbulkan tingkat pengangguran meningkat. Semakin banyak tenaga kerja maka lapangan pekerjaan semakin sempit. Para tenaga kerja yang tidak bekerja atau tidak mendapatkan pekerjaan akan menjadi pengangguran. Tingkat pengangguran tinggi di suatu wilayah akan berdampak pada kemiskinan, karena antara beban atau tanggungan lebih besar daripada pendapatan. Indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan suatu wilayah dapat diukur dengan tingkat pendapatan. Pendapatan yang maksimum dapat dicapai apabila penggunaan tenaga kerja dimanfaatkan secara penuh (Tarigan, 2021). Tingkat pengangguran di Kabupaten Probolinggo termasuk tinggi dan meningkat setiap tahunnya.

Bersumber pada paparan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendidikan, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo selama 10 tahun akhir dengan judul **“Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Probolinggo”**

1.2. Rumusan masalah

1. Apakah ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo?
2. Apakah ada pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo?
3. Apakah ada pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.

1.4. Ruang lingkup

Data yang dipergunakan pada penelitian ini meliputi data *time series* pada kurun waktu selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 dan Kabupaten Probolinggo sebagai objek penelitian. Variabel terikat atau variabel dependen pada penelitian ini menggunakan tingkat kemiskinan dan variabel independen yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto, pendidikan, dan pengangguran.

1.5. Manfaat penelitian

Manfaat yang disandarkan pada penelitian ini akan berperan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan pembangunan guna mensejahterakan penduduk Indonesia pada umumnya dan penduduk Kabupaten Probolinggo pada khususnya. Pada bidang ilmu pengetahuan diharapkan penelitian ini berguna sebagai studi empiris untuk kedepannya.